



Efektivitas Surat Keterangan Kurang Mampu dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga Tidak Mampu

Nisa Ulkhair

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

email : ulkharanisa337@gmail.com

Abstract. Poverty remains a structural issue in Indonesia, requiring policy instruments that can expand low-income households' access to essential public services. The Certificate of Indigency (SKKM) serves as an administrative document that formally verifies the socioeconomic status of disadvantaged families. This study aims to analyze the effectiveness of SKKM in supporting household economic resilience by facilitating access to education, healthcare, social assistance, and economic empowerment programs. The research employs a descriptive qualitative method based on a systematic review of relevant literature. The findings indicate that SKKM plays a significant role in reducing household expenditure burdens and stabilizing consumption patterns, thereby strengthening the economic resilience of poor families. However, its effectiveness is hindered by inaccurate beneficiary targeting, weak data management, and low administrative literacy among communities. The study concludes that SKKM has the potential to function as a strategic social protection instrument if accompanied by improved data governance, enhanced capacity of local administrators, and stronger integration with long-term economic empowerment programs.

Keywords: Underprivileged Certificate, Economic Resilience, Poor Families

Abstrak. Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural di Indonesia sehingga diperlukan instrumen kebijakan yang mampu memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar. Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM) merupakan salah satu dokumen administratif yang berfungsi sebagai bukti formal kondisi sosial ekonomi keluarga tidak mampu. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas SKKM dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui akses pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta program pemberdayaan ekonomi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan kajian literatur dari berbagai sumber ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKKM berperan penting dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan menjaga stabilitas konsumsi, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh ketidaktepatan sasaran, lemahnya pendataan, serta rendahnya literasi administrasi masyarakat. Kesimpulannya, SKKM dapat menjadi instrumen perlindungan sosial yang strategis apabila diikuti dengan perbaikan tata kelola, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan integrasi program pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Sertifikat Kurang Mampu, Ketahanan Ekonomi, Keluarga Miskin

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah struktural yang memengaruhi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), meskipun angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan secara bertahap, tingkat kerentanan ekonomi di kalangan rumah tangga miskin masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok, keterbatasan peluang kerja, serta dampak krisis ekonomi dan bencana. Oleh karena itu, peran negara sangat penting untuk memberikan perlindungan sosial melalui berbagai kebijakan guna mendukung kelompok masyarakat miskin (Hendri, 2020).

Salah satu instrumen administratif yang digunakan sebagai media akses bantuan sosial bagi masyarakat miskin adalah Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM). SKKM berfungsi

sebagai bukti formal kondisi ekonomi individu atau keluarga dan menjadi prasyarat untuk memperoleh berbagai bantuan seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan pembiayaan usaha produktif. Dengan demikian, SKKM tidak hanya memiliki peran administratif, tetapi juga implikasi ekonomi yang signifikan dalam memperkuat ketahanan hidup keluarga miskin.

Fenomena menarik muncul karena efektivitas SKKM dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, SKKM memperluas akses masyarakat miskin ke program bantuan negara, namun di sisi lain terdapat sejumlah tantangan seperti ketidaktepatan sasaran penerima, potensi penyalahgunaan dokumen, serta lemahnya integrasi data antarinstansi yang menghambat optimalisasi fungsi perlindungan sosial (TNP2K, 2021). Ketahanan ekonomi keluarga miskin sendiri merujuk pada kemampuan mereka untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari tekanan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik dari pendapatan maupun bantuan sosial (Kogoya, 2020). Dalam konteks ini, SKKM diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam menguatkan ketahanan ekonomi tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi tentang bagaimana SKKM dapat bekerja secara optimal untuk mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga tidak mampu. Memahami kendala dan peluang efektivitas SKKM di lapangan akan memberikan arah kebijakan yang lebih tepat sasaran dan peningkatan mekanisme pelaksanaan di masa depan.

Berdasarkan perspektif tersebut, rumusan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas SKKM dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga tidak mampu. Fokus analisis meliputi fungsi SKKM dalam membuka akses bantuan, dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga, serta hambatan-hambatan yang mengurangi efektivitas instrumen ini di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi kajian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini bukan untuk mengukur besaran pengaruh secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana efektivitas Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM) dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga tidak mampu ditinjau dari aspek kebijakan, implementasi, dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan temuan-temuan empiris dari berbagai sumber literatur.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur sistematis (systematic literature review). Proses ini dilakukan dengan menelusuri database jurnal nasional dan internasional seperti Google Scholar, Garuda, Sinta, dan portal jurnal perguruan tinggi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

1. Reduksi Data dilakukan dengan cara menyeleksi, memusatkan perhatian, serta menyederhanakan data yang diperoleh dari berbagai sumber agar hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan.
2. Penyajian Data dilakukan dengan menyusun hasil-hasil kajian dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sesuai dengan subtema pembahasan.
3. Penarikan Kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi kritis terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan pola, hubungan kausal, serta makna yang berkaitan dengan efektivitas SKKM dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga tidak mampu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Surat Keterangan Kurang Mampu dalam Memperluas Akses Keluarga Miskin terhadap Program Pembangunan Ekonomi

Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM) memiliki posisi strategis sebagai gerbang awal bagi keluarga miskin untuk terlibat dalam berbagai program pembangunan ekonomi yang diselenggarakan pemerintah. Dalam konteks pembangunan ekonomi, akses terhadap program bantuan sosial, subsidi pendidikan, layanan kesehatan, dan pembiayaan usaha merupakan faktor kunci dalam mendorong peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga miskin. SKKM berfungsi sebagai instrumen administrasi yang memvalidasi status sosial ekonomi masyarakat sehingga mereka dapat masuk ke dalam sistem perlindungan dan pemberdayaan ekonomi negara (Arsyad & Rijali, 2024). Dalam berbagai program pembangunan ekonomi berbasis inklusi sosial, seperti bantuan modal UMKM, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan non-tunai, SKKM menjadi dokumen dasar untuk menentukan kelayakan penerima.

Lebih lanjut, akses terhadap program pembangunan ekonomi melalui SKKM tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan jangka pendek, tetapi juga berperan dalam memperkuat modal manusia (human capital). Melalui bantuan pendidikan dan kesehatan yang diakses dengan SKKM, keluarga miskin memperoleh peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi jangka panjang (Sentana & Abdurrazzaq, 2023). Dengan demikian, SKKM tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat intervensi pembangunan yang memperkuat basis ekonomi keluarga miskin secara struktural. Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih sangat bergantung pada kualitas sistem pendataan dan mekanisme verifikasi di tingkat desa dan kelurahan. Ketidaktepatan pendataan akan menyebabkan eksklusi sosial bagi keluarga miskin yang seharusnya berhak menerima manfaat pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis perlindungan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh akurasi instrumen administrasi seperti SKKM.

Dampak SKKM terhadap Penguatan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi

Ketahanan ekonomi rumah tangga dalam perspektif pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari kemampuan rumah tangga dalam menjaga stabilitas konsumsi, menghadapi guncangan ekonomi, serta mempertahankan keberlanjutan sumber penghidupan. SKKM berperan penting dalam menjaga stabilitas tersebut melalui akses terhadap berbagai skema bantuan dan subsidi (Hendri). Melalui kepemilikan SKKM, keluarga miskin dapat mengurangi beban pengeluaran pada sektor-sektor dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pengurangan beban ini berdampak langsung terhadap peningkatan daya tahan ekonomi rumah tangga karena sebagian pendapatan dapat dialokasikan untuk kebutuhan produktif, seperti modal usaha kecil atau tabungan darurat. Dalam kajian pembangunan ekonomi, kondisi ini disebut sebagai consumption smoothing, yaitu kemampuan rumah tangga menjaga pola konsumsi agar tetap stabil meskipun berada dalam tekanan ekonomi (Tresnawati, 2025).

Dalam jangka panjang, SKKM juga berkontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi. Program bantuan modal usaha mikro yang mensyaratkan SKKM memungkinkan keluarga miskin untuk masuk ke dalam sektor ekonomi produktif meskipun dengan skala terbatas. Hal ini sesuai dengan temuan (Sentana & Abdurrazzaq, 2023) dalam jurnal Annual Review of Economics yang menyatakan bahwa intervensi kecil berupa akses modal dan jaminan sosial dapat menghasilkan efek multiplikatif terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin. Selain itu, dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, rumah tangga miskin yang memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik cenderung lebih mampu berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi lokal. Partisipasi ini mendorong perputaran ekonomi mikro dan secara tidak langsung memperkuat basis ekonomi wilayah. Oleh karena itu, SKKM memiliki kontribusi tidak langsung terhadap pembangunan

ekonomi lokal melalui penguatan daya tahan ekonomi unit terkecil dalam sistem ekonomi, yaitu rumah tangga.

SKKM sebagai Instrumen Inklusi Sosial dalam Strategi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi modern tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth-oriented), tetapi juga menekankan pada prinsip inklusivitas dan keberlanjutan (inclusive and sustainable development). Dalam paradigma ini, setiap warga negara, termasuk kelompok miskin dan rentan, harus memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya pembangunan (Rizqita & Noor, 2025). SKKM menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin inklusivitas tersebut. Melalui SKKM, keluarga miskin memperoleh pengakuan administratif sebagai kelompok yang berhak menerima intervensi pembangunan. Pengakuan ini sangat penting dalam mencegah terjadinya exclusion error dalam kebijakan pembangunan ekonomi, yaitu kondisi ketika kelompok miskin justru tidak memperoleh manfaat pembangunan (Arsyad & Rijali, 2024). Dengan adanya SKKM, pemerintah memiliki dasar hukum dan administratif untuk mengarahkan sumber daya pembangunan kepada kelompok sasaran.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi berkelanjutan, perlindungan terhadap kelompok miskin juga berfungsi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Akses pendidikan dan kesehatan yang diperoleh melalui SKKM memungkinkan anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang mobilitas sosial yang lebih baik di masa depan. Hal ini sejalan dengan konsep intergenerational mobility dalam pembangunan ekonomi yang menekankan pentingnya intervensi negara dalam memutus pewarisan kemiskinan (Angga Nugraha Sentana and Abdurrazzaq) Selain itu, SKKM juga berfungsi sebagai alat pengendali ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan yang terlalu tinggi terbukti dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena menurunkan produktivitas dan memperlemah kohesi sosial (Oy et al., 2025). Dengan memastikan bahwa kelompok miskin memperoleh akses terhadap layanan dasar dan program pemberdayaan ekonomi melalui SKKM, negara turut menjaga keseimbangan dalam proses pembangunan ekonomi nasional.

Kendala Implementasi SKKM dan Implikasinya terhadap Efektivitas Pembangunan Ekonomi

Meskipun SKKM memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak langsung terhadap efektivitas pembangunan itu sendiri. Salah satu kendala utama adalah ketidaktepatan sasaran akibat lemahnya sistem pendataan kemiskinan. Data yang tidak mutakhir menyebabkan terjadinya leakage, yaitu bantuan justru dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu, sementara rumah tangga yang lebih miskin terpinggirkan (Tresnawati and Riyanto). Selain itu, masih ditemukan praktik penyalahgunaan SKKM untuk kepentingan tertentu, baik dalam akses pendidikan, kesehatan, maupun bantuan ekonomi. Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan kelompok miskin, tetapi juga menciptakan inefisiensi dalam alokasi sumber daya pembangunan. Dalam teori pembangunan ekonomi, inefisiensi semacam ini akan menurunkan tingkat pengembalian sosial (social return) dari kebijakan publik yang dijalankan (Nata & Ifansyah, 2024).

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kapasitas kelembagaan di tingkat pemerintahan desa. Aparatur desa sering kali belum dibekali dengan kemampuan teknis pendataan ekonomi yang memadai, sehingga proses verifikasi SKKM sangat bergantung pada penilaian subjektif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bias dan konflik sosial di tengah masyarakat. Dari sudut pandang pembangunan ekonomi institusional, kualitas institusi lokal sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan (Kakwani and Son). Selain faktor kelembagaan, rendahnya literasi administrasi masyarakat miskin juga turut menghambat efektivitas SKKM. Banyak keluarga miskin yang tidak memahami prosedur pengurusan dan pemanfaatan SKKM untuk mengakses program pembangunan ekonomi. Akibatnya, mereka tetap berada di luar sistem bantuan yang seharusnya dapat memperkuat ketahanan ekonomi mereka. Jika kendala-kendala ini tidak segera diatasi, maka SKKM

berpotensi kehilangan fungsinya sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Pembahasan

Hasil kajian mengenai efektivitas Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM) menunjukkan bahwa dokumen ini memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga tidak mampu, khususnya melalui peningkatan akses terhadap layanan publik dan program perlindungan sosial. Temuan ini sejalan dengan pandangan ekonomi kesejahteraan yang menempatkan intervensi negara sebagai instrumen penting dalam mengoreksi ketimpangan sosial ekonomi dan melindungi kelompok rentan dari risiko kemiskinan yang bersifat sistemik. SKKM berfungsi sebagai pintu masuk administratif yang memungkinkan keluarga miskin memperoleh subsidi pendidikan, layanan kesehatan gratis, serta berbagai bantuan sosial yang secara langsung mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Dari perspektif ketahanan ekonomi keluarga, keberadaan SKKM terbukti membantu menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga miskin. Ketika biaya pendidikan dan kesehatan dapat ditekan melalui fasilitas berbasis SKKM, maka alokasi pendapatan keluarga dapat dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya seperti pangan dan perumahan. Kondisi ini memperkuat daya tahan ekonomi keluarga terhadap guncangan ekonomi, seperti fluktuasi pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Temuan ini konsisten dengan teori ketahanan ekonomi rumah tangga yang menekankan pentingnya perlindungan sosial sebagai mekanisme perlindungan terhadap risiko ekonomi jangka pendek dan menengah.

Selain berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, SKKM juga memiliki implikasi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Akses pendidikan yang lebih terbuka bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu melalui SKKM berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas pendidikan ini diharapkan dapat memperluas peluang kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat mobilitas sosial ekonomi antargenerasi. Dengan demikian, SKKM tidak hanya berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi keluarga saat ini, tetapi juga berperan dalam memutus rantai kemiskinan di masa depan. Namun demikian, diskusi temuan juga menunjukkan bahwa efektivitas SKKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Masalah ketidakstetapan sasaran penerima manfaat masih menjadi kendala utama akibat lemahnya sistem pendataan kemiskinan di tingkat lokal. Dalam beberapa kasus, terdapat keluarga yang secara ekonomi relatif mampu tetapi masih menggunakan SKKM untuk memperoleh fasilitas tertentu. Sebaliknya, tidak sedikit keluarga yang benar-benar miskin justru tidak terdata sebagai penerima manfaat. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan dalam tata kelola administrasi dan akurasi verifikasi sosial ekonomi aparat pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan.

Selain persoalan penargetan, tantangan lainnya terletak pada keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap fungsi strategis SKKM. Sebagian masyarakat masih memandang SKKM sebagai dokumen administratif yang hanya digunakan untuk keperluan sesaat, seperti bantuan biaya berobat atau sekolah, tanpa memahami potensi jangka panjangnya dalam mendukung peningkatan kapasitas ekonomi. Rendahnya literasi administrasi dan informasi kebijakan publik menyebabkan pemanfaatan SKKM belum sepenuhnya optimal, terutama dalam mengakses program-program pemberdayaan ekonomi produktif yang seharusnya dapat memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Dari sisi kebijakan publik, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas SKKM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi di lapangan. Konsistensi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di tingkat daerah menjadi faktor penentu keberhasilan SKKM dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga. Tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang kuat, SKKM berpotensi kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan sosial dan hanya menjadi formalitas administratif dalam pelayanan publik.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif, SKKM sejatinya memiliki posisi strategis sebagai alat integrasi antara program perlindungan sosial dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, keterpisahan antara bantuan sosial yang bersifat konsumtif dan

program pemberdayaan yang bersifat produktif masih menjadi kelemahan yang mengurangi dampak SKKM terhadap ketahanan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Idealnya, keluarga penerima SKKM tidak hanya memperoleh bantuan jangka pendek, tetapi juga diarahkan secara sistematis untuk terlibat dalam program peningkatan pendapatan, pelatihan keterampilan, dan penguatan usaha mikro. Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa SKKM telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga tidak mampu, terutama melalui pengurangan beban biaya dasar dan peningkatan akses layanan publik. Namun, untuk menjadikan SKKM sebagai instrumen yang benar-benar efektif dalam jangka panjang, diperlukan perbaikan tata kelola, akurasi data kemiskinan, integrasi lintas program, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap fungsi strategis SKKM dalam pembangunan ekonomi keluarga

KESIMPULAN

Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM) memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga tidak mampu. SKKM bukan hanya dokumen administratif, melainkan instrumen kebijakan yang membuka akses keluarga miskin ke berbagai bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi. Melalui SKKM, keluarga dapat memperoleh jaminan pendidikan, layanan kesehatan, serta bantuan modal usaha, yang membantu mengurangi beban pengeluaran dan memperkuat daya tahan ekonomi mereka. Namun, efektivitas SKKM masih terbatas oleh kendala seperti ketidaktepatan sasaran dan rendahnya literasi administrasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pendataan dan peningkatan kapasitas aparatur desa agar SKKM dapat berfungsi optimal. Dengan pengelolaan yang baik, SKKM mampu mendorong pembangunan ekonomi inklusif, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, M., & Rijali, S. (2024). Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu Pada Kantor Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Japb*, 7.
- Hendri. (2020). Efektivitas Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (Sktm) Di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *Jurnal Kajian Pemerintah (Jkp)*, 6(1), 1–13.
- Kogoya, W. (2020). *Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bagi Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19*.
- Nata, S. A., & Ifansyah, M. N. (2024). Efektivitas Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (Sktm) Di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Japb*, 7, 1601–1616.
- Oy, M. K., Hariadi, F., Mikaela, R., & Malo, I. (2025). Perancangan Dan Implementasi Aplikasi Pelayanan Surat Keterangan Untuk Kelurahan Lambanapu.” , Vol. 13, No. 1, 2025, <Https://Doi.Org/10.23960/Jitet.V13i1.5722>. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 13(1).
- Rizqita, A., & Noor, M. (2025). Relasi Antara Kepada Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Japb*, 8(6), 2024–2035.
- Sentana, A. N., & Abdurrazzaq, M. A. (2023). Pembangunan Aplikasi Pengambilan Keputusan Pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu Berbasis Website Pada Kelurahan Rawaterate. *Kalbiscientia, Jurnal Sains Dan Teknologi*, 10(02).
- Tresnawati, D. (2025). Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Publik Berbasis Website Di Kecamatan Pangkah. *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(2), 2459–2464.